

Cara Mudah Akses KUR: Regulasi Baru Pelaksanaan KUR

Easy Way to Access Kur: New Regulations for Implementing KUR



Idha Susanti, S.Pt, M.M

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

■ Realisasi KUR bidang peternakan 5 tahun terakhir

Salah satu sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha peternakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi permodalan ini untuk pelaku usaha peternakan sejak tahun 2016 sebesar 2,7 triliun rupiah untuk 135 ribu lebih peternak sampai dengan tahun 2022 senilai 28,60 triliun rupiah untuk 766 ribu lebih peternak atau meningkat 10 kali lipat.

Permodalan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha on farm yaitu budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran ataupun penggemukan. Belum dilaporkan oleh Sistem Informasi Kredit Program adanya pemanfaatan untuk off farm pengolahan pasca farm to table. Kegiatan on farm selama adalah untuk pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya kambing domba, pembibitan dan budidaya ternak perah serta pembibitan dan budidaya babi. Selain itu juga tercatat adanya pemanfaatan untuk kombinasi pertanian yaitu kombinasi perkebunan dan peternakan, dimana setelah dikonfirmasi sebagian besar dimanfaatkan untuk pembelian ternak sapi.

Dalam mengakses salah satu skema pembiayaan ini mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko) sebagai ketua komite pelaksana KUR yang diperbaharui setiap tahun. Sumber pembiayaan ini adalah dari lembaga pembiayaan penyalur KUR yang

Realization of KUR in the livestock sector in the last 5 years ■

The People's Business Credit (KUR) is one financial resource that livestock business actors can make use of. Realization of this capital for livestock business actors since 2016 amounted to 2.7 trillion rupiah for 135 thousand more breeders until 2022, or 28.60 trillion rupiah for 766 thousand more breeders, or an increase of 10 times.

Most of the capital is used for on-farm businesses, namely nursery cultivation and enlargement or fattening cultivation. It has not been reported by the Program Credit Information System that there is utilization for off-farm post-farm-to-table processing. The current off-farm activities are breeding and cultivating beef cattle, breeding and cultivating poultry, breeding and cultivating goats, breeding and cultivating dairy cattle, and breeding and cultivating pigs. In addition, it was also recorded that there was utilization for a combination of agriculture, namely a combination of plantations and livestock, where, after being confirmed, most of it was used to purchase cattle.

In accessing one of these financing schemes, refer to the regulations issued by the Coordinating Minister for Economic Affairs (Kemenko) as chairman of the KUR implementing committee, which are renewed annually. The source of this financing is the KUR channeling financing institution determined by the Coordinating Ministry, while the

ditetapkan oleh Kemenko, sementara pemerintah menyediakan selisih bunga yang menjadi beban peternak.

government provides the difference in interest, which is borne by the farmer.

■ Perbedaan Regulasi KUR lama dan baru untuk bidang peternakan

Differences in the old and new KUR regulations for the livestock sector ■

Uraian	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus
Suku Bunga	6%	6%	6%	6%
	3%	6% naik berjenjang	6% naik berjenjang	6% naik berjenjang
Plafon (Rp)	≤ 10 juta	>10 - ≤100 juta	>100 - ≤500 juta	≤ 500 juta
	≤ 10 juta	>10 - ≤100 juta	>100 - ≤500 juta	≤ 500 juta
Total Plafon (Rp)	tidak dibatasi	tidak dibatasi	500 juta per debitur	tidak dibatasi
	tidak dibatasi	maksimal 4 kali akad	maksimal 4 kali akad	maksimal 4 kali akad
Agunan Pokok				
	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR
Agunan Tambahan	tidak diperlukan	tidak diperlukan	sesuai kebijakan dan penilaian penyalur	sesuai nilai yang diajukan
	tidak diperlukan	tidak diperlukan	sesuai penilaian	a. sampai 100 juta tidak diperlukan b. > 100 sesuai penilaian
Ketentuan Tambahan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	a. Belum pernah menerima KUR b. Dapat menjadi Peserta BPJS	dapat menjadi peserta BPJS	Wajib menjadi peserta BPJS	a. berkelompok dan punya mitra b. > 100 juta wajib menjadi peserta BPJS

Beberapa hal baru pada regulasi KUR yang baru

Perubahan pedoman pelaksanaan KUR tahun 2023 cukup banyak meskipun tidak mencabut pedoman sebelumnya. Beberapa perubahan yang harus

Several new things in the new KUR regulation ■

There have been quite a number of changes to the KUR implementation guidelines in 2023, although they did not revoke the previous guidelines. There

diperhatikan bagi para calon debitur dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat dunia peternakan yang akan mengajukan permodalan jenis ini. Perubahan yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah:

1. **Penurunan suku Bunga untuk super mikro menjadi 3%.** Suku bunga jenis ini cukup menarik karena paling rendah tetapi batas plafonnya sangat rendah. Hal ini kurang cocok untuk usaha peternakan karena terlalu kecil, sehingga sangat jarang pelaku usaha peternakan memanfaatkan KUR jenis super mikro ini.
2. **Pembatasan akses untuk bidang usaha peternakan maksimal 4 kali.** Pelaku usaha peternakan dibatasi maksimal 4 kali akad kredit meskipun dengan batas maksimal plafon 500 juta rupiah. Jadi meskipun belum mencapai plafon maksimal tetapi jika sudah 4 kali akad pelaku usaha peternakan tidak dapat lagi mengajukan permodalan KUR ini.
3. **Adanya penurunan berjenjang terhadap subsidi KUR untuk Mikro, kecil dan khusus atau meningkatkan berjenjang beban bunga debitur peternak.** Graduasi penerapan bunga yang harus dibayarkan peternak pada akad kredit pertama adalah sebesar 6%, akad kredit kedua adalah sebesar 7%, akad kredit ketiga adalah sebesar 8% dan akad kredit keempat adalah sebesar 9%.
4. **Calon debitur KUR belum pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial** Persyaratan tersebut kecuali kredit consumer yang dikecualikan seperti kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga, kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Persyaratan ini akan memperkecil kemungkinan jumlah peternak yang mengakses KUR, hal ini antara lain disebabkan peternak yang memerlukan permodalan KUR dan akan mengakses pembiayaan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah usahanya dan sudah pernah menggunakan KUR atau

are several changes that must be considered by prospective borrowers and need to be socialized to the livestock world community who will apply for this type of capital. The changes that need attention are:

1. **Lower interest rates for supermicro to 3%.** *This type of interest rate is quite interesting because it is the lowest, but the ceiling limit is very low. This is not suitable for livestock businesses because it is too small, so it is very rare for livestock business actors to use this type of super micro KUR.*
2. **Restricting access for the livestock business sector to a maximum of four times** *Livestock business actors are limited to a maximum of 4 times the credit agreement, even with a maximum limit of 500 million rupiah. So even though the maximum ceiling has not been reached, if there have been four contracts for livestock business actors, they can no longer apply for KUR capital.*
3. **There is a gradual decrease in KUR subsidies for micro, small, and special breeders or an increase in stages in the interest expense of breeder debtors.** *Graduation of application of interest to be paid by breeders on the first credit contract is 6%, the second credit contract is 7%, the third credit contract is 8%, and the fourth credit contract is 9%.*
4. **Prospective KUR debtors have never received commercial investment/working capital loans.** *These requirements are excepted for consumer credit, which is excluded, such as consumption credit/financing for household needs, ultra-micro scale or scheme credit or financing, or the like, and/or loans to information technology-based joint funding service companies or digital-based finance companies. This requirement will reduce the possibility of the number of farmers accessing KUR. This is partly because farmers who need KUR capital and will access this financing have the aim of*

KEBIJAKAN KUR TAHUN 2023

Plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran subsidi KUR di dalam APBN 2023, disertai Penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR



Kebijakan KUR Kembali ke Masa Sebelum Pandemi COVID-19

Suku bunga KUR kembali ke 6% tanpa tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3%

Target penyaluran KUR di sektor produksi kembali ditetapkan sebesar 60%

Kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp600 juta

Memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d. 31 Maret 2024 (sesuai POJK)



Kebijakan KUR Mendorong Graduasi Debitur KUR

1. Penurunan suku bunga KUR Super Mikro dari 6% menjadi 3%
2. Pembatasan maksimal akses KUR Mikro:
 - Sektor non-produksi dan sektor produksi non-pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: maksimal akses KUR Mikro sebanyak 2 (dua) kali
 - Sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 (empat) kali
3. Suku bunga/margin KUR Mikro dan KUR Kecil naik secara berjenjang (subsidi bunga KUR *sliding*/menurun berjenjang) untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang:
 - Debitur baru akses KUR pertama kali sebesar 6%
 - Debitur berulang akses ke-2 kali sebesar 7%
 - Debitur berulang akses ke-3 kali sebesar 8%
 - Debitur berulang akses ke-4 kali sebesar 9%



Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR

- Penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR s.d. Rp100 juta dengan pemberian sanksi tidak dibayarkan dan/atau pengembalian subsidi margin.
- Penegasan syarat calon Penerima KUR tidak pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial (kecuali kredit konsumen yang dikecualikan)
- Perubahan ketentuan terkait BPJS Ketenagakerjaan, Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp100 juta berubah frasa dari sebelumnya **dapat** menjadi **wajib** untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Penambahan kerja sama subrogasi pada PKS *online system* Penjaminan KUR.
- Penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR, dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023.
- Tambahan insentif GWM untuk penyaluran KUR

jenis kredit modal kerja dan investasi lainnya. Jumlah peternak yang belum pernah sama sekali berpengalaman mengajukan kredit sangat sedikit karena dua kemungkinan yaitu 1) peternak yang selama ini menggunakan modal pribadi dan 2) peternak yang belum berpengalaman sama sekali. Peternak yang belum memiliki pengalaman sama sekali dengan pinjaman akan sangat berhati-hati ketika ditawarkan modal dengan menggunakan KUR.

5. Calon debitur KUR juga dapat bersamaan menerima kredit dengan kolektibilitas lancar Pembiayaan yang dapat diakses dalam waktu bersamaan tersebut yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang; dan/atau kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan non bank.
6. Penerima KUR kecil dan khusus wajib menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Persyaratan ini juga cukup berat pada para pelaku usaha

increasing the number of businesses and have already used KUR or other types of working capital credit and investment. The number of breeders who have never had any experience applying for credit is very small because of two possibilities: 1) breeders who have so far used personal capital; and 2) breeders who have no experience at all. Breeders who have no experience with loans will be very careful when offered capital using KUR.

5. Prospective KUR debtors can simultaneously receive credit with current collectibility. The financing that can be accessed at the same time is KUR at the same dealer, home ownership loans, two-wheeled motor vehicle leasing loans for productive purposes, loans guaranteed by pension decree, credit cards, warehouse receipt loans, and/or consumption credit for household needs from banks and non-bank financial institutions.
6. Recipients of small and special KUR are required to become BPJS employment participants. This requirement is also quite

peternakan karena menjadi peserta BPJS juga memerlukan biaya iuran setiap bulan yang ini merupakan beban pengeluaran baru bagi peternak.

■ Potensi penyaluran KUR tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR tahun 2023 pemerintah menetapkan plafon yang cukup tinggi yaitu sebesar 450 triliun rupiah dengan target penyaluran KUR sektor produksi sebesar 60% atau sebesar 270 triliun rupiah termasuk didalamnya untuk pelaku usaha bidang peternakan. Kementerian pertanian membuat target untuk realisasi KUR pertanian sebesar 100 triliun rupiah dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan peternakan diberikan tugas untuk dapat memberikan fasilitasi akses KUR sebesar 24 triliun rupiah dengan rincian 15 triliun rupiah untuk KUR produksi dan 9 triliun rupiah untuk KUR alsintan.

Target tersebut bukanlah target yang mudah untuk dicapai karena beberapa regulasi yang baru mulai diterapkan sejak Januari 2023 seperti tidak ada lagi tambahan subsidi bunga atau margin KUR sebesar 3%. Dengan adanya perubahan pada persyaratan KUR yang cukup signifikan menjadikan calon debitur KUR akan semakin tersaring antara lain karena:

1. Menurunnya minat calon debitur untuk mengakses KUR karena subsidi bunga yang mengalami graduasi dan debitur KUR kecil wajib menjadi peserta BPJS.

heavy on livestock business actors because being a BPJS participant also requires a contribution fee every month, which is a new expenditure burden for farmers.

■ Potential KUR distribution in 2023

In implementing KUR financing in 2023, the government has set a fairly high ceiling of IDR 450 trillion with a target of KUR distribution in the production sector of 60%, or IDR 270 trillion, including for business actors in the livestock sector. The Ministry of Agriculture set a target for the realization of agricultural KUR of 100 trillion rupiah, and the Directorate General of Livestock and Animal Husbandry Health was given the task of being able to facilitate access to KUR of 24 trillion rupiah, with details of 15 trillion rupiah for production KUR and 9 trillion rupiah for agricultural machinery KUR.

This target is not an easy one to achieve because several new regulations have been implemented since January 2023, such as no additional interest subsidy or a KUR margin of 3%. With significant changes to the KUR requirements, prospective KUR debtors will be increasingly screened, among other reasons, because:

1. *The decreased interest of prospective debtors in accessing KUR is due to interest subsidies that have graduated, and small KUR debtors*

REALISASI AKAD KREDIT dan JUMLAH DEBITUR TAHUN 2023

KODE SEKTOR PETERNAKAN

Per 31 Maret 2023

NO	SEKTOR USAHA (KBLI LBU*)	DEBITUR	AKAD KREDIT (Rp.)
1	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	19.575	879,789,734,000
2	Pembibitan dan Budidaya Unggas	5.140	351,100,812,000
3	Pembibitan dan Budidaya Kambing Domba	6.612	224,493,950,000
4	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	2.580	159,934,984,000
5	Pembibitan dan Budidaya Babi	2.581	136,967,400,000
TOTAL		36.488	1,752,286,880,000

*KBLI LBU = KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA LAPORAN BANK UMUM

Sumber : SAKURA (Sistem Informasi KUR Pertanian) diolah Ditjen PKH

2. Calon debitur dari para peternak yang memerlukan modal usahanya tersaring dengan persyaratan antara lain tidak pernah memiliki kredit modal kerja atau investasi.
3. Kecenderungan bank penyalur menghindari penyaluran kredit tanpa agunan bagi debitur baru yang karakternya belum dikenal oleh perbankan.

■ Cara Mudah Akses KUR

Permodalan yang menggunakan skema kredit KUR, tidak sulit untuk diakses dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan penyalur. Selain memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh peternak ketika mau mengakses permodalan ini.

1. Peternak sudah memiliki usaha minimal enam bulan;
2. Peternak memiliki kepastian pendapatan atau memiliki langganan pembeli terhadap produksi, sehingga usaha memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan setiap siklus usahanya;
3. Peternak memiliki mitigasi resiko usaha sehingga dapat meminimalisir ketika terjadi resiko usaha;
4. Mengisi formulir pendaftaran KUR dari Lembaga pembiayaan penyalur. Jika tidak mengenal bank penyalur atau lembaga pembiayaan penyalur KUR dapat menghubungi dinas kabupaten pendamping.
5. Tidak memiliki riwayat tidak baik pada pinjaman.

are required to become BPJS participants.

2. *Prospective debtors from breeders who need business capital are screened with conditions, including never having a working capital or investment loan.*
3. *The tendency of channeling banks to avoid lending without collateral to new debtors whose characteristics are not yet known to banks.*

Easy Way to Access KUR ■

Capital that uses the KUR credit scheme is not difficult to access by following the steps set by the channeling financing institution. In addition to meeting the requirements that have been set, here are some important things that need to be considered by breeders when they want to access this capital.

1. *The farmer has had a business for at least six months;*
2. *The farmer has income certainty or has a purchaser's subscription to production, so that the business has records of expenditure and income for each business cycle;*
3. *Breeders have business risk mitigation so that they can minimize when business risks occur;*
4. *Fill out the KUR registration form from the channeling financing institution. If you do not know the channeling bank or KUR financing institution, you can contact the accompanying*



Sosialisasi dan koordinasi akses KUR Provinsi Lampung



Fasilitasi Akses KUR di Pringsewu dan Lampung Selatan

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan pembiayaan skema KUR ini dan memberikan fasilitasi akses kepada peternak sesuai dengan Permenko. Hal ini juga telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Dinas Peternakan Provinsi Lampung, dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan.

Hal ini sangat perlu dilakukan terutama karena target KUR Tahun 2023 adalah untuk para peternak UMKM yang belum tersentuh atau baru mulai mengenal pembiayaan melalui kredit, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang sampai ke peternak.

Demikian juga apa yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan bertujuan untuk fasilitasi akses KUR, dimana para peternak merasa kesulitan mengakses KUR. Setelah dilakukan audiensi diperoleh realisasi bahwa peternak belum pernah mengisi formulir pengajuan KUR kepada bank penyalur. Melalui fasilitasi akses tersebut peternak dapat langsung ketemu dengan penyalur yang diharapkan dan mendapatkan penjelasan langsung. Setelah bank melakukan kunjungan kepada lokasi usaha, maka bank dapat memberikan tanggapan terhadap pengajuan para peternak.(is)

district office.

5. *Do not have a bad history with loans.*

The central, provincial and district governments also have the task of socializing the financing of this KUR scheme and facilitating access to farmers in accordance with the Permenko. This has also been carried out by the Directorate General of Livestock and Animal Health together with the Livestock Service Office of Lampung Province, the agency that handles livestock and animal health functions in Pringsewu and South Lampung Regencies.

This really needs to be done, especially because the 2023 KUR target is for MSME breeders who have not been touched or are just starting to get to know financing through credit, so socialization and assistance is needed that reach the breeders.

Likewise, what was done in Pringsewu and South Lampung districts aimed at facilitating KUR access, where farmers found it difficult to access KUR. After the hearings were held, it was realized that the farmer had never filled out the KUR submission form to the channeling bank. Through this facilitation of access, breeders can directly meet the expected distributors and get direct explanations. After the bank visits the business location, it can respond to the farmers' submissions.(is/tr-mua)